

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri atas 2 kawasan pembangunan yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). KBI terdiri atas pulau Sumatera, Jawa dan Bali, sedangkan KTI terdiri atas pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku. KTI merupakan kawasan pembangunan yang memiliki tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang relatif rendah dibandingkan dengan KBI. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
PDRB Riil 2010 Menurut Provinsi di KBI dan KTI
Tahun 2016 (Milyar Rupiah)

Provinsi di KBI	2016	Provinsi di KTI	2016
1. Aceh	116.386,73	1. Nusa Tenggara Barat	94.548,21
2. Sumatera Utara	463.775,46	2. Nusa Tenggara Timur	59.775,7
3. Sumatera Barat	148.110,75	3. Kalimantan Barat	118.184,63
4. Riau	458.998,09	4. Kalimantan Tengah	83.909,49
5. Jambi	130.499,63	5. Kalimantan Selatan	115.727,55
6. Sumatera Selatan	266.815,41	6. Kalimantan Timur	438.977,04
7. Bengkulu	40.082,87	7. Kalimantan Utara	51.164,99
8. Lampung	209.807,19	8. Sulawesi Utara	74.771,07
9. Kep. Bangka Belitung	47.852,69	9. Sulawesi Tengah	91.070,55
10. Kep. Riau	162.922,5	10. Sulawesi Selatan	269.338,55
11. DKI Jakarta	1.539.376,65	11. Sulawesi Tenggara	77.739,55
12. Jawa Barat	1.275.546,48	12. Gorontalo	23.507,15
13. Jawa Tengah	849.383,56	13. Sulawesi Barat	27.550,26
14. DI Yogyakarta	87.687,93	14. Maluku	26.291,19
15. Jawa Timur	1.405.236,11	15. Maluku Utara	21.556,32
16. Banten	387.595,37	16. Papua Barat	54.711,28
17. Bali	137.192,52	17. Papua	142.476,35

Sumber: BPS Pusat

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa besarnya PDRB atas dasar harga konstan (ADHK/riil) menurut provinsi di KBI dan KTI tahun 2016. Berdasarkan Tabel 1.1, KBI dan KTI masing-masing terdiri atas 17 provinsi. Empat belas provinsi di KBI memiliki tingkat PDRB di atas Rp100.000,00 milyar dan sisanya ada tiga provinsi dengan tingkat PDRB relatif rendah di bawah Rp100.000,00 milyar yaitu Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung dan DI Yogyakarta. KTI juga memiliki 5 provinsi yang tingkat PDRB-nya di atas Rp100.000,00 milyar yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan, sisanya ada 12 provinsi yang tingkat PDRB nya di bawah angka tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan antar daerah KBI dan KTI.

Kesenjangan pendapatan antar daerah terjadi karena pemerintah pusat menguasai dan mengendalikan hampir sebagian besar pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara. Pendapatan tersebut digunakan untuk pembangunan daerah. Pembangunan masih terpusat pada KBI khususnya di Pulau Jawa, dan sektor modern umumnya berada di perkotaan, sedangkan sektor tradisional berada di pedesaan. Hal ini membuat kesenjangan pendapatan semakin melebar, pengangguran semakin bertambah, dan tingkat kemiskinan semakin tinggi. Kesenjangan pendapatan antar daerah menyebabkan terjadinya kesenjangan kemajuan antar daerah, antara KBI dan KTI, serta antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Bila dilihat per kawasan, provinsi yang memiliki pendapatan daerah atau PDRB terendah di KBI adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar Rp40.082,87 milyar, dan di KTI ada Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar Rp21.556,32 milyar.

Maluku Utara juga merupakan provinsi dengan pendapatan daerah terendah di Indonesia. Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian Timur Indonesia tepatnya di Kepulauan Maluku. Provinsi Maluku Utara resmi dibentuk tanggal 4 Oktober 1999, melalui UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku yaitu sebagai Kabupaten Maluku Utara.

Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi baru dengan PDRB yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah ketergantungan perekonomian daerah pada sektor-sektor tertentu yang selama ini dikembangkan melalui konsep keunggulan sektoral pada masa sebelum otonomi daerah (Kuncoro, 2004: 74-75). Hal ini banyak ditemukan pada kasus pembangunan ekonomi di KTI, terutama daerah yang mengandalkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai sumber utama pertumbuhan di daerah. Provinsi-provinsi ini antara lain Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah dengan rata-rata kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di atas 20 persen.

Tahun 2016 Provinsi Maluku Utara menempati posisi ke-5 dari 17 provinsi di KTI untuk kontribusi di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu sebesar 24.96 persen. Sektor Jasa-jasa memberikan kontribusi terbesar ke-3 setelah Maluku, dan NTT, yaitu sebesar 22.87 persen. Sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor Industri Pengolahan (Manufaktur) memberikan kontribusi

terbesar ke-10 dan ke-12, yaitu sebesar 8.39 persen dan 5.39 persen. Sementara itu, kontribusi terbesar Provinsi Maluku Utara disumbangkan melalui sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu sebesar 17.65 persen dan merupakan kontribusi terbesar di KTI (Tabel 1.2).

Tabel 1.2
Persentase Kontribusi Sektor-Sektor Utama Terhadap PDRB Provinsi
Di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2016

Provinsi	PKP	J-J	Pertambangan	Industri	Perdagangan
Maluku Utara	24.96	22.87	8.39	5.39	17.65
Maluku	23.87	32.16	2.03	5.39	13.18
Sulawesi Tengah	29.56	12.47	11.83	11.87	9.16
Sulawesi Tenggara	24.3	12.4	19.35	6.11	12.39
Sulawesi Barat	41.3	17.66	2.30	9.44	10.41
Sulawesi Utara	21.71	16.10	4.82	8.99	12.11
Sulawesi Selatan	23.29	12.67	5.60	13.92	13.41
Gorontalo	37.44	16.87	1.20	4.19	10.95
Papua	12.11	13.88	35.5	2.03	8.76
Papua Barat	10.94	13.99	19.13	26.4	6.58
Nusa Tenggara Timur	29.1	26.81	1.60	1.21	10.75
Nusa Tenggara Barat	21.33	14	21.83	3.88	12.41
Kalimantan Barat	20.22	13.61	5.60	16.10	14.47
Kalimantan Timur	8.06	5.24	43.34	20.51	5.55
Kalimantan Tengah	21.94	14.15	10.82	16.33	11.68
Kalimantan Utara	18.09	9.85	24.65	10.08	11.47
Kalimantan Selatan	14.91	14.2	20.87	13.98	9.42

Sumber : BPS (diolah)

Keterangan :

PKP : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

J-J : Jasa-Jasa

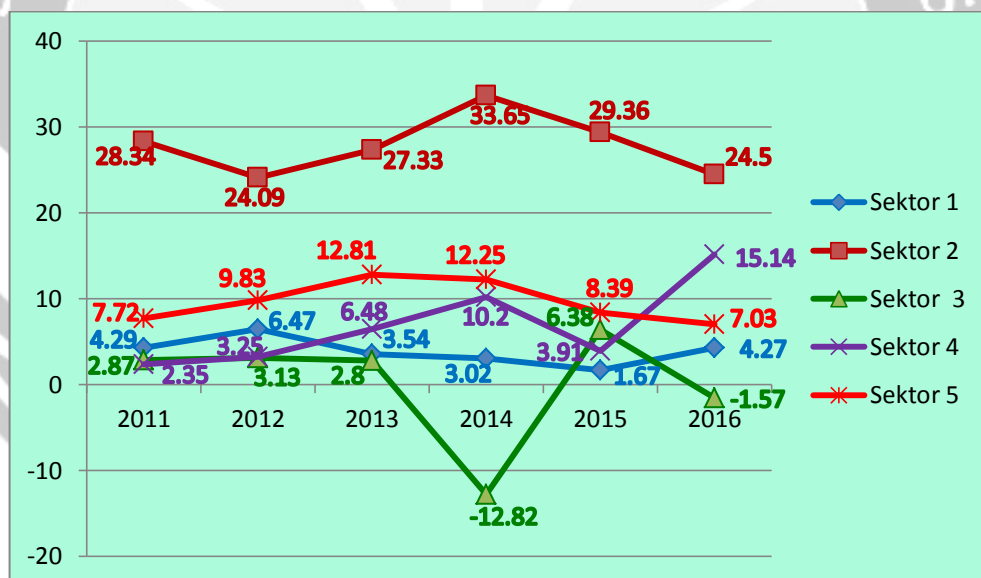
Pertambangan : Pertambangan dan Penggalian

Industri : Industri Pengolahan (Manufaktur)

Perdagangan : Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa ketergantungan daerah pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan untuk pengembangan perekonomian ini tidak membuat sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan bahkan rata-

rata pertumbuhannya di bawah 5 persen kecuali yang terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 6.47 persen. Hal ini menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang disebabkan oleh adanya penurunan hasil sektor tersebut. Sektor lain yang mengalami rata-rata pertumbuhan di bawah 5 persen yaitu sektor Industri Pengolahan dan sektor Pertambangan dan Penggalian. Rata-rata pertumbuhan sektor Industri Pengolahan di bawah 5 persen ini disebabkan oleh berkurangnya pasokan bahan baku hasil hutan, dan meningkatnya harga energi, akan tetapi pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi disebabkan oleh adanya kenaikan produksi industri.



Sumber : BPS Maluku Utara

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Riil Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011-2016 (Persen)

Keterangan :

Sektor 1 : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor 2 : Jasa-Jasa

Sektor 3 : Pertambangan dan Penggalian

Sektor 4 : Industri Pengolahan/Manufaktur

Sektor 5 : Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan hingga menyentuh angka minus yang terjadi pada tahun 2014 sebesar -12,82 dan tahun 2016 sebesar -1,57. Perlambatan sektor Pertambangan dan Penggalian ini disebabkan oleh adanya penurunan produksi hasil pertambangan biji logam. Sementara itu, sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sektor Jasa-Jasa dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor Jasa-Jasa merupakan gabungan dari sektor Administrasi Pemerintah, sektor Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan serta sektor Jasa lainnya.

Sektor Jasa-Jasa juga merupakan sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu rata-rata di atas 20 persen. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor kedua terbesar setelah sektor Jasa-Jasa dengan rata-rata pertumbuhannya diatas 7 persen. Kedua sektor ini, walaupun memiliki laju pertumbuhan yang tinggi, pada tahun 2014 hingga tahun 2016 sektor Jasa-Jasa terus mengalami penurunan pertumbuhan, sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami penurunan mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2016.

Berdasarkan kondisi tersebut, ada 3 sektor utama yang mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Jasa-Jasa dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus pada upaya pembangunan daerah. Menurut Arsyad (2010:374),

pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Hal ini dapat dicapai jika pemerintah mampu mengatasi masalah yang dapat menghambat pembangunan daerah.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas (*unique value*) dari daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal/daerah (Arsyad, 2010:374). Hal ini berarti Pemerintah Daerah dalam upaya melakukan pembangunan daerah sebaiknya mengembangkan potensi lokal yang ada untuk menunjang perekonomian daerah. Upaya tersebut memerlukan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan perekonomian daerah yang selanjutnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Arsyad (1999:116) mengatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Oleh karena itu, sumberdaya potensial harus dikelola secara optimal sehingga barang dan jasa yang diproduksi dalam daerah tersebut bertambah, yang selanjutnya berdampak pada terjadinya peningkatan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Peningkatan produksi barang

dan jasa ini akan meningkatkan pendapatan daerah, secara berkelanjutan atau terus menerus akan menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya akan merangsang perkembangan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, identifikasi sektor-sektor ekonomi di daerah yang dapat dikembangkan menjadi sektor basis sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya kondisi pembangunan yang berkelanjutan di daerah tersebut. Pengembangan sektor basis ini diharapkan tidak hanya berdampak pada ekonomi sektor-sektor lainnya di daerah tersebut, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi sektor-sektor di daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa sektor basis tidak hanya mengisyaratkan laju pertumbuhan yang tinggi melainkan juga mampu bersaing dengan sektor-sektor ekonomi lain baik yang ada di daerah maupun daerah lain sehingga sektor tersebut memberikan prospek yang baik terhadap perekonomian daerah (regional).

Identifikasi sektor basis memang penting akan tetapi hal tersebut dirasa belum cukup. Hal ini dikarenakan identifikasi sektor basis tidak mencakup cara bagaimana untuk melihat perubahan struktur ekonomi suatu daerah seperti perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama (provinsi/nasional), pengaruh bauran industri dan seberapa jauh daya saing industri (sektor) daerah dibanding dengan daerah ditingkat yang lebih tinggi (provinsi/nasional). Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat perubahan tersebut yaitu dengan identifikasi pergeseran sektor basis ekonomi, sehingga tidak hanya mengetahui tentang sektor-sektor yang dapat

dikembangkan menjadi sektor basis tetapi juga dapat mengetahui tentang perubahan struktur ekonomi yang terjadi di daerah.

Metode identifikasi sektor basis dan pergeserannya dapat dilakukan dengan pendekatan analisis *Location Quotient* (LQ), analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ), analisis *Shift-Share* (SS). Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sektor basis di suatu daerah, selain itu juga analisis ini akan melibatkan analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) untuk memperlengkapi analisis *Location Quotient* (LQ), sehingga dapat diketahui sektor prediksi yang menjadi prioritas di masa depan. Analisis *Shift-Share* (SS) dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pergeseran sektor-sektor ekonomi/perubahan struktur ekonomi daerah. Ketiga analisis tersebut akan digunakan untuk membantu dalam mengidentifikasi pergeseran sektor-sektor basis dan sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk pengembangan potensi ekonomi daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan sektor-sektor ekonomi di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2011-2016.
2. Sektor-sektor ekonomi apa saja yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi sektor basis di Provinsi Maluku Utara.
3. Bagaimana pergeseran sektor basis dan prospeknya di Provinsi Maluku Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan sektor-sektor ekonomi di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2011-2016.
2. Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi apa saja yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi sektor basis di Provinsi Maluku Utara.
3. Untuk mengetahui pergeseran setiap sektor dan prospeknya di Provinsi Maluku Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Pemerintahan Daerah dan juga sebagai tolak ukur atau gambaran kinerja sektor ekonomi di Provinsi Maluku Utara.
2. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang pergeseran sektor basis ekonomi di Provinsi Maluku Utara.

4. Sebagai sumber informasi bagi pihak investor untuk menilai kinerja sektor-sektor ekonomi di Provinsi Maluku Utara sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi.
5. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam disiplin ilmu yang ditekuni.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab 1 ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Teori yang melandasi penelitian ini akan dikemukakan dalam Bab 2 ini.

BAB III Metode Penelitian

Dalam Bab 3, akan diuraikan tentang data dan sumber data yang digunakan peneliti; metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif untuk menjelaskan rumusan masalah yang pertama dan analisis kuantitatif dengan alat analisis yang digunakan meliputi analisis *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), *Shift-Share* (SS) akan digunakan untuk menjelaskan rumusan masalah yang kedua dan ketiga. Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sektor basis di Provinsi Maluku Utara, selain

itu juga analisis ini melibatkan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) untuk memperlengkapi *Location Quotient* (LQ), sehingga dapat diketahui sektor yang menjadi prioritas di masa depan Analisis *Shift-Share* (SS) akan menggunakan 3 pengujian yaitu *National Growth Effect*, *Proportional Shift* dan *Differential Shift*.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab 4 berisi hasil dari penghitungan rumus, hasil dari analisis *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), *Shift-Share* (SS). Pembahasan secara ekonomi lebih lanjut dari hasil berbagai macam uji tersebut juga akan dikemukakan dalam Bab 4 ini.

BAB V Penutup

Dari hasil dan pembahasan yang ada di Bab 4 tersebut, dapat diperoleh kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan dan beberapa saran dari peneliti juga akan dikemukakan di Bab 5 ini.